

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian skripsi peneliti yang berjudul “*Peranan Benazir Bhutto dalam Memperjuangkan Demokrasi di Pakistan Tahun 1977-2007*”. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Terdapat 4 hal yang dapat disimpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, dan akan dipaparkan sebagai berikut.

Pertama, kondisi sosial-politik di Pakistan sejak awal kemerdekaannya mengalami banyak permasalahan, salah satunya adalah masalah penegakan demokrasi yang tak kunjung usai. Hal tersebut disebabkan oleh adanya campur tangan dari kalangan militer yang masuk ke dalam dunia politik. Tercatat dalam rentang waktu 1947-1977 terjadi tiga kali kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan sipil, kudeta ketiga yang dilakukan oleh militer yang dipimpin oleh Jenderal Zia ul-Haq. Kudeta tersebut dilakukan tanpa adanya pertumpahan darah, namun meminta “tumbal” pemimpin sebelumnya yaitu Zulfikar Ali Bhutto yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.

Pemerintahan rezim militer Zia menggunakan tameng agama sebagai jalur melanggengkan kekuasaannya. Dirinya meminta dukungan dari partai-partai Islam dan para ulama untuk membentuk sebuah pemerintahan negara yang berlandaskan Islam. Konsep tersebut awalnya diterima dengan baik oleh kalangan Islam konservatif, dimana sebelumnya mereka menolak adanya liberalisme Islam yang dibawa oleh Zulfikar Ali Bhutto. Janji-janji yang dilontarkan oleh Jenderal Zia ul-Haq direalisasikan dalam sebuah konsep Islamisasi dalam semua sektor kehidupan masyarakat, dampak dari kebijakan memang terasa oleh sebagian kalangan, namun sebagian lagi merasa tidak mendapatkan dampak positif salah satunya adalah kaum perempuan yang tersudutkan. Pemerintahan militer ternyata dirasakan oleh para politisi, baik yang awalnya mendukung Zia maupun oposisi

yang mengkritik Zia karena masih menggunakan kekuasaan militernya dalam menjalankan pemerintahan yang seharusnya demokratis.

Kedua, ketika pemerintahan militer Zia berlangsung, lawan politik yang kuat pun bemunculan, salah satunya adalah putri mendiang Zulfikar Ali Bhutto yaitu Benazir Bhutto. Permasalahan muncul ketika budaya patriarki yang melekat dan keyakinan masyarakatnya menganggap tabu seorang pemimpin perempuan, sehingga langkah dirinya dalam dunia politik tidak semulus para pesaingnya yang lain terutama dari kalangan laki-laki. Hal lainnya yang menyebabkan dirinya sulit diterima oleh masyarakat Pakistan, karena dia adalah putri mantan PM Pakistan sebelumnya yang membawa paham liberal ke negara dengan penduduknya mayoritas beragama Islam dan cenderung menolak adanya konsep liberal. Faktor lain yang membuat dirinya sulit menghadapi pemerintah, karena pemerintah dengan militernya memiliki kekuatan yang besar bahkan mampu mengendalikan semua unsur negara termasuk parlemen dan peradilan.

Pendidikan politik yang ditempuh di Amerika Serikat dan Inggris, sedikit banyak mempengaruhi gaya berpolitik Benazir. Konsep demokrasi yang diterapkan di Barat dan konsep Islam di negaranya dicoba untuk dipadukan, sehingga tidak sedikit berharap padanya untuk memberikan sebuah perubahan di Pakistan. Kharisma yang dimiliki oleh sang ayah membuat Benazir pun memperoleh keuntungan, meskipun dianggap liberal oleh beberapa kalangan, sang ayah tetap merupakan salah seorang tokoh penting dalam perpolitikan di Pakistan yang memiliki basis masa besar. Kelompok Islam konservatif merupakan lawan politik yang tak kalah kuat selain pemerintah militer pimpinan Zia ul-Haq, mereka masih menganggap bahwa perempuan tidak layak sebagai seorang pemimpin sebuah negara.

Ketiga, upaya dalam menggulingkan pemerintahan militer Zia ul-Haq menjadi prioritas utama bagi para politikus di Pakistan yang menghendaki adanya sebuah negara demokrasi. Gerakan-gerakan tersebut bahkan mampu menyatukan partai-partai politik yang awalnya berseberangan guna memaksa

Jenderal Zia ul-Haq mundur dari jabatannya. Mereka bergabung dibawah panji MRD (*Movement for Restoration of Democracy*) yang dipimpin oleh Benazir Bhutto (*Pakistan People Party*) dengan para partai politik seperti PML (*Pakistan Muslim League*), PDP (*Pakistan Democratic Party*), JUI (*Jamiat-i-Ulema-i-Islam*) dan partai politik lainnya. Gerakan tersebut dibalas awalnya dengan sikap tak acuh dari pemerintahan Zia ul-Haq, namun seiring peningkatan aksi yang dilakukan oleh mereka, maka pemerintahan Zia melakukan tindakan represif dalam menangani demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi.

Kemenangan yang diharapkan dari gerakan-gerakan tersebut tidak kunjung mendapatkan hasil untuk menurunkan Zia dari jabatannya, sampai pada peristiwa berdarah kecelakaan pesawat yang tumpang oleh Jenderal Zia, para petinggi militer Pakistan dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Pakistan meledak dan menewaskan seluruh penumpangnya pada tanggal 17 Agustus 1988. Kematian Zia ul-Haq menjadi duka, sekaligus babak baru bagi Republik Islam Pakistan dalam memulai tahap baru proses demokrasi. Para elit politik Pakistan termasuk Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif berlomba dalam memperebutkan kekuasaan di negara tersebut, juga menampilkan ciri khas dari demokrasi yang mereka yakini untuk membangun negeri tersebut menjadi lebih baik.

Keempat, kematian dari Jenderal Zia ul-Haq dimanfaatkan dengan baik oleh Benazir Bhutto untuk meraih simpati dari seluruh kalangan masyarakat. Hal ini dapat diwajarkan, karena pada masa pemerintahan militer dirinya dan para politisi lainnya sulit mengembangkan konsep demokrasi di negara tersebut. Pemilu pertama pasca pemerintahan militer Zia dilaksanakan pada Bulan November 1988 yang dimenangkan oleh PPP partai utama pengusung Benazir Bhutto, sekaligus menempatkan dirinya menjadi seorang Perdana Menteri perempuan pertama di Pakistan dan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam pasca kolonialisme Barat di Asia. Langkah yang dilakukan oleh politisi perempuan ini dalam menjalankan pemerintahannya diantaranya adalah memperbaiki masalah hukum dan penegakan demokrasi di negara tersebut.

Kebijakan pemerintahan Benazir yang mencoba untuk memperbaiki keadaan sosial, ekonomi dan politik di Pakistan, nyatanya tidak diimbangi dengan dukungan yang kuat dari partai politik lain. Pihak oposisi mengajukan mosi tidak percaya bagi Benazir karena dianggap lalai dalam menangani konflik etnis yang terjadi, meskipun mosi tidak percaya tersebut tidak berhasil, tapi memberikan efek yang signifikan pada kondisi pemerintahannya. Puncak dari ketidakpuasan publik terhadapnya adalah tahun 1990, dimana presiden Ghulam Ishaq Khan membubarkan pemerintahannya yang dianggap korup dan tidak benar menangani konflik yang terjadi baik di dalam negeri maupun konflik dengan negara tetangga India.

Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh rival politiknya, yaitu Nawaz Sharif yang berjanji mengembalikan keadaan yang kondusif dan stabil di Pakistan. Pada kenyataannya tidak jauh berbeda dari pendahulunya, kestabilan ekonomi dan politik di Pakistan yang agak sulit untuk dikendalikan menjadi bumerang bagi Nawaz Sharif yang bertahan hingga tahun 1993. Pemilu 1993 menjadi ajang pertarungan Nawaz Sharif dan Benazir Bhutto yang ketiga kalinya dalam memperebutkan suara rakyat, namun kali ini PML pimpinan Nawaz Sharif harus kembali mengakui keunggulan PPP pimpinan Benazir Bhutto dalam pemilu tersebut. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang menampilkan aroma persaingan yang ketat bahkan saling menjatuhkan diantara keduanya, pemilu kali ini justru lebih kondusif dan stabil.

Kekuasaan yang dipegang oleh Benazir tidak bertahan lama, terbukti tuduhan lama mengenai korupsi yang dilakukan olehnya beserta keluarga dan anggota partainya menjadi salah satu penyebab kejatuhannya. Lawan politiknya menuduh dia dan suaminya melakukan korupsi serta menjadi dalang dibalik kematian adiknya sendiri Murtaza Bhutto yang dikabarkan akan menjadi pesaingnya di pemilu berikutnya. Pada tahun 1996 menjadi akhir karir politiknya sebagai Perdana Menteri Pakistan sekaligus awal pengasingan di negeri orang. Tahun 1997 pemilu kembali digelar tanpa keikutsertaan dirinya dikarenakan hukuman dari pengadilan yang melarang dirinya kembali ke Pakistan atau dirinya

akan menerima hukuman penjara sama seperti sang suami dengan tuduhan korupsi, akhirnya pemilu tersebut dimenangkan oleh Nawaz Sharif yang berkuasa hingga tahun 1999.

Peristiwa tak terduga terjadi pada tahun 1999, pejabat militer kepercayaan Nawaz Sharif yaitu Perves Musharaf melakukan tindakan kudeta tak berdarah terhadap pemerintahannya. Peristiwa kudeta militer keempat yang terjadi itu menjadi sebuah perbincangan yang terjadi di kalangan dunia internasional, pasalnya Pakistan merupakan negara yang berhasil menerapkan demokrasi secara damai ketika masa-masa krisis global tahun 1990-an. Kenyataan pergantian kekuasaan tersebut nyatanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masa depan Benazir, dia masih dilarang untuk pulang ke negaranya. Pada awal milenium baru, Musharaf agaknya lebih terbuka terhadap konsep demokrasi dan mengajak berunding Benazir untuk dapat berbagi kekuasaan dengannya pada pemilu tahun 2007.

Benazir menanggapi dingin terhadap pernyataan tersebut pada awalnya, namun dirinya sadar tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk negerinya apabila dia dalam pengasingan di negeri orang. Akhirnya dia menyetujui keputusan tersebut, dengan syarat namanya dan keluarga dibersihkan dari tuduhan korupsi yang tidak pernah dapat dibuktikan secara hukum tersebut. Pada tahun 2007 dirinya disambut oleh ribuan pendukungnya yang merindukan dirinya untuk kembali memimpin Pakistan, namun kejadian naas terjadi ketika dalam sebuah kampanye terbuka pada tanggal 27 Desember 2007 berondongan peluru bersarang ditubuh mantan Perdana Menteri Pakistan tersebut yang disusul dengan aksi bom bunuh diri. Hingga saat ini pembunuhan terhadap Benazir masih menyimpan misteri dalang dibalik peristiwa tersebut, banyak teori bermunculan mulai dari ulah Musharaf hingga teroris pimpinan Osama bin Laden dituduh dibalik meninggalnya Benazir Bhutto.

5.2 Saran

Skripsi yang berjudul ” *Peranan Benazir Bhutto dalam Memperjuangkan Demokrasi di Pakistan Tahun 1977-2007*” ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat

Bagi lembaga pendidikan, kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan materi pada mata pelajaran Sejarah khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Semoga dengan adanya penelitian ini siswa di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat mampu memperluas wawasannya dan menambah pengetahuannya untuk mendalami sejarah bangsa lain.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Kajian pustakan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini salah satunya adalah dengan mengkaji penelitian terdahulu berupa skripsi-skripsi ataupun tesis yang memiliki sedikit kesamaan dalam tema yang diangkat. Oleh sebab itu, skripsi ini pun penting untuk peneliti selanjutnya dalam menulis tentang sejarah kawasan Asia Selatan khususnya Pakistan.

3. Bagi Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia

Bagi Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), skripsi ini diharapkan dapat memperkaya tulisan mengenai sejarah Asia Selatan khususnya Pakistan dan negara-negara lainnya. Karena sejauh ini, skripsi yang meneliti tentang sejarah Pakistan masih jarang ditemukan di Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

4. Bagi Para Siswa

Semangat pantang menyerah dan kegigihan Benazir Bhutto dapat menjadi teladan yang baik dalam memperjuangkan keadilan. Dari sosoknya kita dapat melihat sosok tangguh perempuan, jadi jangan sampai menyerah sebagai perempuan, karena semua perempuan mempunyai derajat yang sama di mata Allah SWT.